

# **PLURALITAS DAN HETEROGENITAS DALAM KONTEKS PEMBINAAN KESATUAN BANGSA**

**I Gde Semadi Astra**

Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Lewat pendekatan historis dan secara empiris diketahui bahwa wilayah Kepulauan Nusantara atau Indonesia pada dewasa ini, adalah sangat kental dengan corak pluralitas dan heterogenitas, baik di bidang kultural maupun struktur sosial masyarakatnya. Corak tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai jenis orang asing, baik dilihat dari dimensi etnik maupun ras, yang datang dan sempat menjadi penghuni wilayah ini. Mudah dipahami bahwa selain memiliki sisi positif, corak pluralitas dan heterogenitas itu tentu membawa serta sisi negatif seperti berbagai konflik baik bersifat laten maupun manifes dan potensi-potensi pemecah bangsa lainnya. Dengan kata lain, bukan mustahil dalam masyarakat dan bangsa Indonesia secara potensial ada tarik menarik antara kekuatan sentripetal dan sentrifugal yang dapat menghambat terbentuk serta terbinanya kesatuan Indonesia yang betul-betul masif. Bahkan, dapat menggagalkan terwujudnya kesatuan bangsa apabila kekuatan sentrifugal diberi kesempatan berkembang secara bebas.

Kekhawatiran yang telah digambarkan apabila bermakna kewaspadaan adalah wajar. Akan tetapi, kekhawatiran yang bermakna keputusan sudah tentu tidak patut dimiliki oleh para penyelenggara negara Indonesia, apalagi oleh seluruh bangsa ini. Dikatakan demikian, karena bangsa atau negara ini sesungguhnya telah memiliki berbagai senjata ampuh untuk mengatasi dampak negatif kekuatan sentrifugal itu, dan sekaligus berarti mengupayakan terwujudnya kesatuan yang kokoh. Di antara senjata-

senjata itu sebut saja misalnya ideologi negara yakni Pancasila yang pada hakikatnya sejalan dengan paham multikulturalisme yang berkembang belakangan ini, berbagai produk peraturan serta perundang-undangan, dan kearifan-kearifan lokal di Indonesia yang dapat melandasi pelaksanaan kewenangan para penyelenggara negara. Hal yang sesungguhnya masih sangat diperlukan adalah kemauan dan kemampuan memungsikan senjata-senjata ampuh tersebut secara arif bijaksana dan tepat sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi.

**Kata-kata kunci:** pluralitas, heterogenitas, sentripetal, sentrifugal, Pancasila, multikulturalisme, kearifan lokal.

## 1. Pendahuluan

Berbicara mengenai masyarakat atau bangsa yang dimiliki oleh suatu negara, tampaknya dapat dikatakan – kalau tidak boleh dipastikan – bahwa tidak ada masyarakat atau bangsa yang singularitas dalam dimensi etnik maupun ras, dan dengan demikian tertutup pula kemungkinannya menunjukkan homogenitas dalam bidang budaya maupun yang lainnya. Sebaliknya, keadaan pluralitas dan heterogenitas dapat dipahami selalu melekat dan mewarnai masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Bahwasanya ada perbedaan kuantitas yang terkait dengan kepluralitasannya dan ada perbedaan intensitas yang berkenaan dengan keheterogenitasannya adalah sebuah keniscayaan.

Perlu ditambahkan bahwa yang dimaksud dengan pluralitas di sini, yang dalam konsep oposisi biner merupakan kontraposisi singularitas, pada hakikatnya mengindikasikan adanya sifat kejamakan atau kemajemukan, bukan kesatuan atau ketunggalan. Sementara itu, yang dimaksud dengan heterogenitas sebagai kontraposisi homogenitas pada dasarnya menunjukkan suatu kualitas dari keadaan yang tidak sama atau keanekaan dalam unsur-unsurnya.

Seperti telah dikatakan, dapat dipastikan bahwa secara kuantitas sifat kejamakan dan secara intensitas sifat keberagaman yang dimiliki oleh suatu bangsa atau masyarakat adalah berbeda. Dalam hal ini, jika dibandingkan dengan masyarakat Jepang misalnya, kepluralitasan dan keheterogenitasan masyarakat Indonesia adalah jauh lebih kompleks. Bahkan, kiranya dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia termasuk salah satu di antara masyarakat-masyarakat yang paling problematis di dunia (*cf.* Kusumohamidjojo, 2000 : xx).

Sifat keproblematisan yang dihadapi Indonesia sebagaimana telah disinggung di atas ini, sudah tentu membawa serta pelbagai masalah dan kendala yang sewaktu-waktu dapat menghambat upaya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia. Penulis tidak berpretensi mampu membahas hal-hal itu secara tuntas, apalagi menawarkan cara-cara pemecahan masalah (*problem solving*) yang baru. Tulisan ini mencoba mengangkat beberapa masalah mendasar yang dihadapi bangsa ini – atau berpeluang dihadapinya – serta upaya-upaya pemecahan masalah-masalah tersebut dalam mewujudkan tujuan pembinaan kesatuan bangsa, yang sebagian besar mungkin telah dikemukakan oleh penulis lain. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk lebih menyadarkan pihak-pihak terkait bahwa bangsa ini sesungguhnya telah mempunyai “senjata yang cukup ampuh” dalam upaya mencapai tujuan pembinaan kesatuan bangsa. Sudah tentu keampuannya itu akan terbukti jika senjata-senjata tersebut digunakan dengan benar secara kontekstual.

## **2. Fenomena Pluralitas dan Heterogenitas Masyarakat Indonesia**

Pendekatan historis tentang masyarakat Indonesia – yang sebagian besar di antaranya menjadi unsur pembentuk bangsa Indonesia pada dewasa ini – dapat memberikan pemahaman logis

mengenai keadaan plural dan heterogen masyarakat ini. Sejarah merekam bahwa wilayah Kepulauan Nusantara yang kini telah terwujud menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah kedatangan manusia – yang bukan saja berbeda dalam dimensi etnik tetapi juga ras – dari beberapa belahan dunia. Kelompok-kelompok manusia tersebut sudah tentu berperan besar dalam menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang plural dan heterogen dalam bidang kultur. Untuk memperjelas pernyataan ini, menarik untuk dikemukakan rekaman ucapan Clifford Geertz yang berikut ini.

*“When one looks panoramically at Indonesia today it seems to form a dateless synopsis of its own past, as when the artifacts from different levels of a long-occupied archaeological site, scattered along a table, summarize at a glance thousands of years of human history. All the cultural streams that, over the course of some three millennia, have flowed, one after the other, into the archipelago – from India, from China, from the Middle East, from Europe – find their contemporary representation somewhere : in Hindu Bali; in the China – towns of Jakarta, Semarang, or Surabaya; in the Moslem strongholds of Aceh, Makassar, or the Padang Highlands; in the Calvinized regions of Minahasa and Ambon, or the Chatolicized ones of Flores and Timor” (Geertz, 1980:3).*

Gambar yang telah dikemukakan memanglebihmenekankan pada pluralitas dan heterogenitas Indonesia dalam bidang kehidupan budaya sebagaimana tampak pada dewasa ini. Namun, C. Geertz tidak mengingkari bahwa sebagai akibat kehadiran orang-orang dari berbagai belahan dunia itu, yang masing-masing juga membawa serta sistem kemasyarakatannya, telah menjadikan pula Indonesia sebagai negara yang memiliki struktur sosial yang bersifat plural dan heterogen. Kepluralitasan serta keheterogenitan Indonesia dalam bidang tersebut dikemukakan oleh C. Geertz dalam lanjutan gambarannya tentang Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut.

*“The range of social structure is equally wide, equally recapitulative: the Malayo-Polynesian tribal systems of interior Borneo or the Celebes; the traditional peasant village of Bali, West Java, and parts of Sumatra and the Celebes; the “post traditional” rural proletarian villages of the Central and East Java river plains; the market-minded fishing and smuggling villages of the Borneo and Celebes coasts; the faded provincial capitals and small towns of interior Java and the Outer Islands; and the huge, dislocated, half-modernized metropolises of Jakarta, Medan, Surabaya, and Makassar. The range of economic forms, of systems of stratification, or of kinship organization is as great: shifting cultivators in Borneo, caste in Bali, matriliney in West Sumatra. Yet, in this whole vast array of cultural and social patterns, one of the most important institutions (perhaps the most important) in shaping the basic character of Indonesian civilization is, for all intents and purposes, absent, vanished with a completeness that, in a perverse way, attests its historical centrality – the negara, the classical state of precolonial Indonesia” (Geertz, 1980: 3 – 4).*

Gambaran ringkas di atas ini kendati tidak mencakup seluruh wilayah Indonesia, kiranya tetap dapat dikatakan bahwa Geertz telah berhasil memberikan gambaran umum bahwa Indonesia memang negara yang sangat kompleks dalam bidang struktur sosial; begitu pula dalam bidang budaya, sebagaimana telah digambarkan sebelumnya. Bahkan, mudah dapat dipahami bahwa keadaan tersebut mengimplikasikan pula terjadinya kepelbagaian pada aspek-aspek kehidupan yang lainnya, seperti bahasa, hukum, kecenderungan dalam memilih lapangan pekerjaan, dan tata krama pergaulan.

Jika diperhatikan secara lebih saksama, kehadiran “orang-orang asing” di Kepulauan Nusantara yang telah dikemukakan oleh Geertz adalah yang terjadi pada waktu Kepulauan ini telah berada pada masa sejarah, atau paling tidak pada saat wilayah ini menjelang memasuki masa sejarahnya. Sesungguhnya, sebelum masa itu,

yakni pada masa prasejarah, wilayah Kepulauan Nusantara telah dimasuki oleh orang-orang atau manusia yang tergolong bangsa atau rumpun lain, yaitu bangsa Austronesia yang berasal dari Asia Tenggara. Menurut H. Kern dan von Heine Geldern bangsa itulah yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia. Dikatakannya pula bahwa kedatangan mereka di kepulauan ini dapat dipilah menjadi dua gelombang atau dua ambalan. Gelombang pertama terjadi pada zaman neolitikum, kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Mereka datang dengan membawa kebudayaan kapak persegi, memasuki wilayah Kepulauan Nusantara bagian barat. Cabang kebudayaan neolitikum yang lain disebut cabang kapak lonjong (neolitikum Papua) dengan penduduknya bangsa Papua-Melanesoide. Bangsa ini kemudian terlebur menjadi bangsa Austronesia (Soekmono, 1985 : 79, Soejono (ed), 1984: 206).

Gelombang kedua terjadi pada zaman logam atau zaman perundagian, kira-kira 500 tahun sebelum Masehi. Pada masa ini kedatangan mereka membawa aliran kebudayaan “baru” yang disebut kebudayaan Dongson (Soekmono, 1985:79; Soejono (ed), 1984:297-300). Perlu ditambahkan bahwa di antara dua gelombang besar tersebut di atas, yang meliputi rentangan waktu kurang lebih 1.500 tahun, sudah tentu bukan berarti bahwa Kepulauan Nusantara sepi sama sekali dari kedatangan bangsa Austronesia. Sebaliknya, mudah dipahami adanya kelompok-kelompok kecil yang sewaktu-waktu datang memasuki Kepulauan yang kini bernama Indonesia. Bahkan, bukan mustahil pula ada yang pulang pergi antara wilayah Kepulauan dan daratan Asia Tenggara. Selain itu, perlu ditekankan pula bahwa kedua gelombang kedatangan orang-orang dari Asia Tenggara ke Kepulauan Nusantara tidaklah harus dipandang atau diartikan sebagai eksodus.

Seiring dengan perjalanan waktu ditimpali dengan keadaan atau situasi lingkungan sosial, budaya, dan alam pada penggalan

waktu yang bersangkutan, mudah dipahami telah terjadi berbagai proses dinamika sosial atau budaya, seperti internalisasi, sosialisasi, enkulturasi (*institutionalization*), evolusi, difusi, asimilasi, akulturasi, dan inovasi di Kepulauan Nusantara yang kini telah menamakan dirinya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagian dari hasil peristiwa-peristiwa tersebut, boleh jadi sudah lenyap, dan sebagian lagi-mungkin sebagian besar-justru semakin mengkristal dan mengkonstruksi nilai-nilai budaya yang menjadi milik kelompok tertentu, di samping ada pula yang menjadi milik bersama dan bersifat konfiguratif. Dengan memperhatikan konsep superstruktur, struktur, dan infrastruktur sebagaimana dikemukakan oleh Sanderson (2000:60 – 63), maka dapat dikatakan bahwa ideologi, agama, dan sebagainya yang termasuk superstruktur kemudian melandasi terciptanya struktur-struktur dalam masyarakat serta mengembangkan dan mengarahkan pembuatan atau pembangunan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat yang bersangkutan. Pendek kata, fenomena kemasyarakatan serta kebudayaan (dalam artian yang seluas-luasnya) yang hidup di negara tercinta ini mencapailah keadaan yang semakin plural, heterogen, dan kompleks.

Keadaan yang beragam dalam berbagai hal itu – selain tidak dapat dihindari – memang tidak dapat dimungkiri juga memiliki dimensi positif dan negatif. Bekalangan ini, kurang lebih menjelang akhir abad XX, berkembang pandangan multikulturalisme yang pada hakikatnya berupaya menjembatani keadaan plural dan heterogen itu agar terjadi pertautan arah yang pada akhirnya bermuara pada keberanian hidup bersatu dalam keberagaman, bukan disatukan dalam keseragaman. Menurut multikulturalisme, harus diterima adanya realitas empiris keanekaragaman, perbedaan, namun bersamaan dengan itu harus dikembangkan pula pandangan kesederajatan, toleransi, persamaan, penghargaan terhadap demokrasi, hak asasi,

dan solidaritas. Bahwasanya ada “hal-hal lain (*liyan*)” atau *the others* (cf. Mulkhan, 2007:1; Atmadja, 2007:7) dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebuah kepastian. Namun, ke-*liyan*-an itu tidak perlu harus menjadi biang keladi perpecahan.

Konsep multikulturalisme sebagaimana telah dikemukakan pada hakikatnya adalah semakna dengan motto Bhinneka Tunggal Ika yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia semenjak memproklamasikan kemerdekaannya; bahkan, telah menjadi milik nenek moyang bangsa ini paling tidak sejak abad XIV ketika kerajaan Majapahit masih tegak berkembang (Tim Penyusun, tt : 3390). Pada tataran ideal, baik konsep multikulturalisme maupun Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya tidak dipermasalahkan lagi. Dengan kata lain, semua orang dapat menerimanya, bahkan memandangnya sebagai konsep yang baik. Namun, kenyataannya permasalahan yang sekaligus menjadi kendala dalam upaya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia tidak kunjung selesai, bahkan secara sporadis konflik atau kerusuhan muncul di sejumlah bagian wilayah negara ini.

Budiono Kusumohamidjojo (2000:9-15) telah mencoba mengidentifikasi serta memilah pelbagai problematika yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ada empat pilihan dikemukakannya, ditambah dengan yang kelima, yang disebutnya sebagai “pekerjaan rumah: kontemplasi spekulatif”. Keempat pilahan itu pada intinya adalah sebagai berikut.

- (1) Dimensi material. Seperti telah diketahui, masyarakat Indonesia adalah multimarga, multisuku, multietnik, multiras, begitu pula sangat beragam dalam aspek-aspek yang berkenaan dengan kebudayaannya. Pendek kata, masyarakat Indonesia bersifat kompleks dalam berbagai halnya.
- (2) Dimensi formal. Bangsa ini telah mengalami “perubahan

orde” dengan pergantian kepemimpinan nasional yang relatif tidak mulus. Kenyataan itu sudah tentu berimplikasi atau mengimbasi berbagai aspek kehidupan, yang sebagian di antaranya telah menimbulkan adanya disharmoni yang mengarah ke perpecahan.

- (3) Tantangan domestik. Antara lain dikatakan bahwa dalam “masyarakat Indonesia” dapat diamati kecenderungan untuk mengubur dan melupakan sejumlah persoalan dan bahkan kejahatan sejarah, dengan kemungkinan secara akumulatif akan menjadi lebih besar di kemudian hari; selain berpeluang pula munculnya masalah yang memang besar dan bersifat lebih destruktif. Dengan demikian, “masyarakat Indonesia” memiliki resiko untuk hidup di atas “timbunan sampah persoalan” yang semakin lama semakin tinggi. Sebagai misal dikemukakannya tentang Pancasila. Pada zaman Orde Lama, Pancasila dipaksakan untuk cocok dengan Nasakom dan pada zaman Orde Baru diciutkan menjadi “Eka Prasetya Panca Karsa”. Lebih lanjut dikatakan bahwa pengurangan itu telah mengimplikasikan pula adanya pengurangan penalaran di kalangan sementara anggota “masyarakat Indonesia”.
- (4) Tantangan global. Pada tataran global, dikatakan telah terjadi pergeseran dari zaman industri ke zaman teknologi informasi. Bangsa Indonesia dinilai belum siap benar menghadapi perubahan nilai yang berkaitan dengan pergeseran sistem yang telah mengglobal itu. Bangsa Indonesia masih cenderung menampilkan diri sebagai “tipe masyarakat yang lain jika dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat yang lain”. Kecenderungan seperti itu dapat dipandang sebagai pertahanan diri (*self defense*) yang tipikal dari orang yang terpojok dalam wacana yang

bersifat lintas batas. Sepatutnya, masyarakat Indonesia harus mampu mengolah keanekaragaman yang ada menjadi sinergi yang produktif untuk menyejahterakan dirinya. Dalam upaya membangun sinergi itu bukan keseragaman yang diperlukan, tetapi komunikasi yang terbuka, yang mampu memupuk rasa saling menghormati, menghargai, serta menemukan hal-hal yang dapat mempersatukan tanpa “memperkosakan” keberagaman untuk dijadikan keseragaman.

- (5) Pekerjaan rumah: kontemplasi spekulatif. Adalah logis kompleksitas masyarakat memiliki potensi konflik. Memang, tiada masyarakat yang tanpa konflik; namun dalam kaitan dengan masyarakat Indonesia, yang perlu dilakukan adalah bahwa potensi konflik tersebut harus diletakkan dalam suatu skema yang rasional yang mendorong ke arah penyelesaian konflik secara rasional dan bijaksana. Ini berarti, harus selalu diupayakan untuk tidak menempatkan manusia di bawah kendali konflik atau menjadikan manusia sebagai budak konflik. Dikatakan pula bahwa salah satu “pekerjaan rumah” yang amat penting adalah mengurai labirin “masyarakat Indonesia” dengan tepat serta komprehensif sehingga labirin tersebut dapat menjadi tempat yang menyenangkan. Pekerjaan rumah yang kedua adalah yang memerlukan keberanian untuk melakukan pilihan antara “negara tertutup” model negara kebangsaan dan “negara terbuka”, model negara pasar dan negara informasi. Sudah tentu pilihan itu harus dilakukan secara cermat agar tidak menyesatkan bangsa ini.

Mudah dipahami bahwa “pekerjaan rumah” ini berfungsi ganda. Di satu sisi merupakan upaya untuk menemukan solusi dalam menghadapi tarik menarik antara

kekuatan sentripetal dan sentrifugal yang terdapat dalam “masyarakat Indonesia”. Di sisi lain, “pekerjaan rumah” ini juga merupakan beban atau tugas kewajiban yang berat, dan sekaligus penuh dengan permasalahan, sebagai konsekuensi dari sifat plural dan heterogen yang melekat pada “masyarakat Indonesia”.

### **3. Upaya Pembinaan Kesatuan Bangsa**

Nengah Bawa Atmadja dalam makalahnya yang telah ditunjuk di depan (Atmadja, 2007) mengemukakan bahwa pendidikan multikultural merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang bersumber pada keadaan masyarakat Indonesia sebagaimana telah digambarkan. Dikatakannya pula bahwa pada saat ini Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional sedang merancang Pendidikan Lintas Kultur Terintegrasi Berbasis Kompetensi untuk Sekolah Dasar dan yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat. Jika rancangan tersebut ternyata baik, maka pendidikan multikultur / lintas kultur akan diterapkan di sekolah-sekolah secara nasional lewat pengintegrasian ke berbagai bidang studi, seperti IPS, IPA, Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, model pendidikan itu terbukti telah berhasil menekan konflik antaretnik atau antarras pada masyarakat yang berbudaya majemuk.

Mudah dipahami bahwa pendidikan multikultural bukanlah satu-satunya cara atau upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah bangsa Indonesia yang sangat kompleks. Bahwasanya masing-masing orang yang menaruh perhatian mengenai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini memiliki buah pikiran

berbeda berkenaan dengan cara mengatasi permasalahan tersebut adalah hal yang wajar pula. Dalam kaitan ini, menarik pula untuk dikemukakan pandangan yang diutarakan oleh Anhar Gonggong (2000 : xiii – xix) dalam “Prakata” yang ditulisnya untuk buku karya Budiono Kusumohamidjojo yang telah disebutkan. Pandangan tersebut – seperti diakuinya sendiri – sesungguhnya disusun berdasarkan pelbagai informasi yang diperolehnya dari karya Budiono Kusumohamidjojo itu. Menurut Anhar Genggong, ada dua hal utama yang harus segera diselesaikan, jika ingin melanjutkan perjalanan untuk mewujudkan tatanan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Pertama, kembali memperbaiki persepsi diri sebagai bangsa-negara baru. Kedua, kembali mendialogkan – dalam artian dialog jujur-jernih, bukan yang bersifat demagog – apa yang dimaksud dengan masyarakat yang demokratis dan hal-hal yang berkaitan dengannya, terutama mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kekuasaan dan pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang demokratis itu.

Dalam memberikan penjelasan berkenaan dengan kedua pandangannya itu, hal-hal yang dikemukakannya antara lain sebagai berikut. Dikatakannya bahwa selama 54 tahun atau memasuki waktu 55 tahun usia kemerdekaan (baca : tahun 1945 – 2000) bangsa ini telah salah dalam memahami diri sebagai bangsa baru yang mendirikan sebuah negara baru dengan bentuk republik, bukan kerajaan. Di sini harus disadari bahwa bangsa baru yang menegakkan negara baru itu adalah dengan cita-cita bersama untuk sejahtera bersama. Cita-cita tersebut jelas merupakan hasil dialog yang dilaksanakan ketika “sinar” matahari abad XX menampakkan dirinya. Dialog itu terjadi di antara warga baru yang terdidik sekaligus cerdas-tercerahkan oleh pendidikan yang diikutinya serta pengalamannya dalam menghadapi sepak terjang penjajah.

Mereka yang mengubah strategi perlawanan terhadap penjajah dari strategi perang fisik (“otot”) ke strategi rasional organisasi (“otak”). Strategi “otot” yang dilakukan secara terpisah-pisah dan bersifat sporadis di bawah pimpinan raja-raja dan pemimpin-pemimpin lokal yang menggunakan waktu tidak kurang dari 300 tahun (tahun 1602 – 1905) – ternyata mengalami kegagalan. Sementara itu, strategi “otak”, dengan menggunakan rasio dan perangkat modern berupa organisasi politik dan massa, disertai pula dengan penguatan cita-cita atau tekad untuk bersatu sebagai sebuah bangsa, yang dilakukan selama 45 tahun (kurang lebih tahun 1900 – 1945) atau 49 tahun (kurang lebih tahun 1900-1949), ternyata telah berhasil gemilang, dengan bukti mampu merebut kembali kemerdekaan yang sempat direnggut oleh para penjajah. Tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 – sebagaimana telah diketahui – bangsa ini telah berhasil memproklamasikan kemerdekaannya dan pada akhir tahun 1949 pemerintah Kerajaan Belanda terpaksa harus mengakui dan menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka penuh.

Selama periode strategi “otak” (1900 – 1945 / 1949) sesungguhnya ada sejumlah dialog yang memiliki arti sangat penting. Pertama, dialog antara tahun 1900 – 1928 dengan klimaks hasil yang dicapai dalam Kongres Pemuda II di Jakarta yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Kedua, dialog yang dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan salah satu hasilnya berupa lahirnya konsep Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 yang “dibidani” oleh Ir. Soekarno. Dengan dua contoh tersebut, kiranya telah cukup menyadarkan serta meyakinkan bangsa ini bahwa dialog yang jujur-jernih memang sangat diperlukan dan bermakna sangat strategis dalam mengatasi permasalahan yang menghadang bangsa ini.

Dalam upaya pemerdayaan akan cara-cara yang perlu

ditempuh untuk mengatasi problematika yang dihadapi Indonesia, sekaligus juga merupakan upaya pembinaan kesatuan bangsa (*nation building*), bukan sebaliknya *nation bleeding*, perlu dikemukakan pula hasil kajian berkenaan dengan konflik-konflik yang terjadi di Ambon (Maluku), Sambas (Kalimantan Barat), dan di beberapa tempat lainnya. Usman Pelly (1999:27-28) antara lain menyatakan bahwa akar permasalahan yang menyulut kerusuhan etnis yang terjadi menjelang era reformasi (Mei 1998) di berbagai kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya tidak berbeda jauh. Akar permasalahan itu adalah kesenjangan sosial ekonomi yang kronis dan akumulatif yang dikemas oleh faktor-faktor etnis dan agama. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan akses terhadap sumber-sumber daya dan ekonomi (*economic resources*), rekayasa sosial, dan perlakuan diskriminatif pemerintahan rezim Orde Baru dalam kesempatan berusaha dan mengembangkan diri.

Perlakuan diskriminatif atas dasar “suka” atau “tidak suka” telah menyebabkan kelompok tertentu merasa diperas dan dipinggirkan serta diperlakukan tidak adil. Sementara itu, kelompok lainnya secara tidak wajar menikmati hak-hak istimewa (*privileges*) dan bersikap angkuh serta represif. Faktor-faktor etnis dan agama sesungguhnya merupakan faktor kemas (pembingkai) dari atribut kesenjangan sosial ekonomi yang menimbulkan perlawanan mereka yang merasa diperas dan dipinggirkan. Akibatnya, potensi konflik antarkelompok yang berseteru semakin besar dan tajam. Dengan kata lain, kesenjangan antarkelompok etnis tersebut menjadi terstruktur dan bersifat hierarkis. Pada gilirannya, potensi konflik dan perlawanan antarkelompok dengan mudah dapat diorganisasikan dan dikobarkan. Lebih-lebih lagi jika ditambah dengan kemas etnis dan legitimasi kesakralan agama (Pelly, 1999:27-28).

Akar permasalahan yang dikemukakan oleh Pelly, atas

dasar kajian yang dilakukan oleh Syarif Ibrahim Alqadrie, pada hakikatnya merupakan faktor utama pula yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di Ambon dan Sambas. Kesenjangan sosial ekonomi antara etnik-etnik yang bertikai di kedua daerah tersebut sesungguhnya juga telah berlangsung cukup lama. Memang ada perbedaan yang bersifat varian di antara yang ditemukan di Ambon dan di Sambas. Di tempat yang disebut belakangan, faktor utama penyebab konflik antara kedua kelompok etnik lebih terletak pada kesempatan kerja dan hak kepemilikan lahan yang secara perlahan-lahan, namun pasti, berpindah dari tangan anggota kelompok etnik Melayu ke pendatang (baru) etnik Madura, dan sering kali melalui kekerasan atau intimidasi. Faktor ini tidak terdapat pada kasus Ambon (Alqadrie, 1994:4).

Dikatakan lebih lanjut bahwa faktor lain sebagai pemicu konflik, baik di Ambon maupun Sambas, adalah ketidakmampuan aparat keamanan menangani atau mengantisipasi gelombang kerusuhan, menjaga netraltitas, dan menunjukkan komitmen pada tugas. Di Sambas ditemukan lagi faktor lain, yaitu eksklusivisme dan arogansi budaya serta premanisme dan tindakan kriminalitas sementara anggota etnik pendatang, sedangkan di Ambon hal ini tidak ditemukan (Alqadrie, 1999:41;51 – 52).

Sejumlah solusi atau upaya pemecahan masalah yang berkenaan atau berkaitan dengan konflik di kedua daerah tersebut telah dikemukakan pula, baik oleh Usman Pelly (1999:31) maupun Alqadrie (1999;46;54). Beberapa di antaranya yang penulis pandang bersifat strategis dalam jangka panjang dikemukakan di sini, yakni sebagai berikut.

- (1) Membebaskan rakyat dari segala bentuk monopoli pusat dan rekayasa sosial dalam berbagai bidang.
- (2) Menata kembali *division of labour* dalam perimbangan yang adil dan profesional serta mengembangkan

lapangan kerja baru.

- (3) Menghidupkan kembali kesepakatan bersama terhadap wilayah kawasan domisili kelompok-kelompok yang bersangkutan.
- (4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparat keamanan agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
- (5) Meningkatkan pembinaan umat agama secara terus menerus, agar tidak hanya memiliki hubungan vertikal (*hablumminallah*), tetapi juga memiliki hubungan horizontal (*hablumminannas*) yang baik atau tinggi.
- (6) Meningkatkan otonomi daerah serta memekarkan daerah yang bersangkutan sesuai dengan keperluan.
- (7) Mendirikan “Pusat Informasi dan Manajemen” tentang keadaan serta keberadaan pendatang dengan tujuan untuk dapat mengantisipasi konflik secara efektif.

Perlu dikemukakan pula solusi yang dikemukakan oleh J.E. Lokollo (dari Pusat Rujuk Sosial, Provinsi Maluku), khusus mengenai kerusuhan yang terjadi di Maluku. Ada tujuh butir solusi dikemukakannya (Lokollo, 1999:92 – 93) yang masing-masing dapat disarikan sebagai berikut.

- (1) Meningkatkan hubungan dialogis lintas SARA dengan mengadakan forum dialog.
- (2) Memperhatikan aspek-aspek pemerataan, keadilan, kesetaraan, tanpa keberpihakan kepada kelompok mana pun dilihat dari segi etnik, agama, dan ras, terutama dalam bidang sarana dan prasarana ekonomi dan perdagangan.
- (3) Sangat diperlukan kebijaksanaan pemerintah mengenai masalah kependudukan dan penataan ruang untuk pengendalian arus urbanisasi dan migrasi.

- (4) Perlu disediakan lapangan kerja di sektor informal yang ditangani serta dikendalikan secara efektif, dengan prioritas kepada mereka yang putus sekolah dan menganggur.
- (5) Perlu dilakukan redefinisi dan revitalisasi peran dan fungsi institusi adat serta dilengkapi dengan landasan legitimasi formal agar mampu berkiprah secara efektif.
- (6) Perlu pembinaan di bidang kemasyarakatan, terutama berkenaan dengan kesadaran, jiwa, semangat, dan wawasan kebangsaan melalui kebijakan-kebijakan terpadu dan terarah.
- (7) Perlu dilakukan sosialisasi mengenai kesadaran bela negara dalam berbagai kesempatan, baik melalui pendidikan formal maupun informal.

Banyak solusi telah dikemukakan; namun kiranya masih banyak yang masih menunggu untuk diungkap dan digunakan secara kontekstual untuk memecahkan masalah-masalah yang telah maupun yang mungkin akan muncul serta menyandung perjalanan bangsa Indonesia. Pelbagai jenis kearifan lokal (*local genius*) yang dimiliki masing-masing daerah di Indonesia, seperti *pela gandong*, *tattwam asi* (kamu adalah dia), *desa kala patra* (tempat, waktu, pelaku), *tepo saliro* (mawas diri), dan *ditintiang ditampih tareh, dipilih antah ciek ciek* (ibarat menampi beras, gabah dipilih satu per satu) (Astra, 2007: 10 – 11) sudah tentu bukan merupakan barang yang tanpa makna dalam upaya pemecahan masalah kebangsaan. Akhirnya, yang amat perlu dikemukakan, walaupun tidak dibahas secara khusus pada kesempatan ini, ialah Pancasila dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Warisan luhur para pendiri (*founding fathers*) bangsa ini sama sekali tidak patut dikesampingkan, apalagi

dilupakan. Sebaliknya, harus dimaknai dan dimaknakan sesuai dengan semangat dan cita-cita luhur yang menyertai kelahirannya serta pemosiannya sebagai dasar negara Republik Indonesia.

#### **4. Penutup**

Beberapa hal yang dapat dikemukakan pada bagian penutup ini adalah sebagai berikut.

Pertama, bahwasanya masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural dan heterogen, bahkan sangat kompleks adalah sebuah kenyataan yang tidak terbantah. Mudah dipahami pula bahwa keadaan plural dan heterogen itu menyimpan potensi keindahan yang tak pernah habis, namun sekaligus juga berpotensi mengesalkan serta menyedihkan hati, bahkan bukan mustahil membawa ke ambang keputusasaan manakala kekuatan sentrifugal mendominasi kekuatan sentripetal yang ada di dalamnya.

Kedua, agar potensi keindahannya semakin kuat serta mampu mewujudkan menjadi realitas yang menawan serta memuaskan hati, para anggota masyarakat Indonesia wajib memahami serta mengejawantahkan dalam kehidupannya makna yang terkandung dalam multikulturalisme.

Ketiga, sesungguhnya bangsa Indonesia memiliki pelbagai “senjata yang amat ampuh” untuk membasmi segala anasir kekuatan sentrifugal yang bersembunyi dalam tubuh masyarakat Indonesia. “Senjata-senjata” tersebut adalah antara lain berbagai gagasan cemerlang yang ditawarkan sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang menghadang bangsa ini, sebagaimana telah disebutkan di depan, pelbagai kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing wilayah di lingkungan Indonesia, dan yang amat penting adalah Pancasila dengan nilai-nilai dasar yang luhur, yang terkandung di dalamnya. Apabila “senjata-senjata ampuh” itu digunakan dengan tepat secara kontekstual, dapat diyakini pembinaan kesatuan bangsa

Indonesia akan mencapai hasil yang gemilang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alqadrie, Syarif Ibrahim. 1999. "Konflik Etnis di Ambon dan Sambas: Suatu Tinjauan Sosiologis". *Antropologi Indonesia*. Th. XXIII. No. 58. Januari – April 1999. Halaman 36 – 57.
- Astra, I Gde Semadi. 2007. "Kearifan Lokal di Nusantara: Konsep, Posisi, dan Fungsinya dalam Pembinaan Budaya Bangsa". (Makalah untuk Matrikulasi Mahasiswa Baru Program Pendidikan Doktor Kajian Budaya, Tahun Ajaran 2006/2007. Denpasar: Fakultas Sastra, Universitas Udayana.
- Atmadja, I Nengah Bawa. 2007. "Identitas Agama, Etnik, dan Nasional dalam Perspektif Pendidikan Multikultural". (Makalah dalam Seminar Nasional Multikulturalisme Agama dan Etnisitas). Denpasar: Universitas Hindu Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan.
- Geertz, Clifford. 1980. *Negara: The Theatre State in Nineteenth – Century Bali*. New Jersey – Princeton : Princeton University Press.
- Gonggong, Anhar. 2000. "Prakata: Hidup dan Sejahtera Bersama dalam Bhinneka Tunggal Ika: Pengantar untuk Memahami Diri", dalam Budiono Kusumohamidjojo, *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2000. *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo.
- Lokollo, J.E. 1999. "Kerusuhan di Maluku: Beberapa Masalah dan Kaitannya dengan Ketahanan Nasional", *Antropologi Indonesia*. Tahun XXIII, No. 58 Januari – April 1999.

Halaman 88 – 93.

- Mulkhan, Abdul Munir. 2007. “*The Others* dalam Bhineka Berbangsa dan Beragama” (Makalah dalam Seminar Nasional Multikulturalisme, Agama, dan Etnisitas). Denpasar: Universitas Hindu Indonesia, Program Magister Ilmu Hukum dan Kebudayaan.
- Pelly, Usman. 1999. “Akar Kerusuhan Etnis di Indonesia”. *Antropologi Indonesia*. Tahun XXIII, No. 58. Januari – April 1999. Halaman 27 – 35.
- Soejono, R.P. (ed). 1984. “Jaman Prasejarah di Indonesia” dalam Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia I*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekmono, R. 1985. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Tim Penyusun, tt. *Ensiklopedi Indonesia Jilid 6*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve.